BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I

UAKPA (108266)

2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 1 Juli 2022
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Widjaja
NIP 196308121983031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
Pernyataan Tanggung Jawab		III
Ringkasan		IV
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	2
III.	Laporan Operasional	3
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	5
	A. Penjelasan Umum	5
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI.	Lampiran dan Daftar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4 CINERE DEPOK
TELEPON 021-7543708, FAXIMILE 021-7543709

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 1 Juli 2022
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Agus Widjaja
NIP 196308121983031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp527.857.072,00 atau mencapai 50,39% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.047.500.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp39.559.064.706,00 atau mencapai 30,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp131.575.093.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp977.903.325.159,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.358.646.604,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp974.564.640.162,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.980.038.393,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.990.423.374,00 dan Rp972.912.901.785,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.575.399,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp49.145.131.666,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp49.134.556.267,00).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp524.799.072,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(48.609.757.195).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp982.967.752.039,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp48.609.757.195,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp476.300.693,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp39.031.207.634,00 kenaikan/penurunan ekuitas (Rp10.054.850.254,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp972.912.901.785,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022		% thd Angg	30 Juni 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.047.500.000	527.857.072	50,39	1.408.092.283
JUMLAH PENDAPATAN		**1.047.500.000**	**527.857.072**	**50,39**	**1.408.092.283**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	20.351.989.000	9.262.836.239	45,51	11.118.343.174
Belanja Barang	B.4	101.913.879.000	26.384.002.467	25,89	20.639.202.649
Belanja Modal	B.5	9.309.225.000	3.912.226.000	42,03	20.835.482.109
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**131.575.093.000**	**39.559.064.706**	**30,07**	**52.593.027.932**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	733.082.692	-
Piutang PNBP	C.4	65.300	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)		65.300	
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	325.498.612	280.464.984
Jumlah Aset Lancar		1.358.646.604	280.464.984
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	687.998.681.000	687.998.681.000
Peralatan dan Mesin	C.15	71.617.722.672	60.088.946.105
Gedung dan Bangunan	C.16	280.926.097.070	292.291.425.798
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	12.359.677.154	9.395.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	1.351.026.622	1.351.026.622
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(79.688.564.356)	(70.484.738.921)
Jumlah Aset Tetap		974.564.640.162	980.640.985.597
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.189.352.500	1.090.352.500
Aset Lain-Lain	C.22	5.693.074.104	5.693.074.104
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(4.902.388.211)	(4.729.673.047)
Jumlah Aset Lainnya		1.980.038.393	2.053.753.557
JUMLAH ASET		**977.903.325.159**	**982.975.204.138**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	300.000.000	-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	3.968.555.680	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	721.867.694	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	7.452.099
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.990.423.374	7.452.099
JUMLAH KEWAJIBAN		4.990.423.374	7.452.099
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	972.912.901.785	982.967.752.039
JUMLAH EKUITAS		972.912.901.785	982.967.752.039
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**977.903.325.159**	**982.975.204.138**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.575.399	1.021.611.173
JUMLAH PENDAPATAN		**10.575.399**	**1.021.611.173**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.672.117.793	11.118.343.174
Beban Persediaan	D.3	750.910.763	528.676.392
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.302.046.001	12.784.878.839
Beban Pemeliharaan	D.5	4.755.272.876	4.243.803.140
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.071.621.827	3.215.880.118
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	5.252.500	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	9.587.909.906	6.585.592.809
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		**49.145.131.666**	**38.477.174.472**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(49.134.556.267)	(37.455.563.299)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		2.200.000	79.141.388
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplius/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		522.599.072	324.682.788
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		522.599.072	324.682.788
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	524.799.072	403.824.176
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(48.609.757.195)	(37.051.739.123)
		-	
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(48.609.757.195)**	**(37.051.739.123)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	982.967.752.039	890.320.575.265
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(48.609.757.195)	(37.051.739.123)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN		(476.300.693)	(821.246.555)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	(1.924.000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI ASET	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(474.376.693)	(821.246.555)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		**(476.300.693)**	**(821.246.555)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	39.031.207.634	54.793.649.569
Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	(39.031.207.634)	
Transfer Masuk Transfer Keluar	E.4.2		
Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	-	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(10.054.850.254)	16.920.663.891
EKUITAS AKHIR	E.5	**972.912.901.785**	**907.241.239.156**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat *(faster)*, lebih baik *(better)*, lebih murah *(cheaper)*, dan terbaru *(newer)*.

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis subtantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan assessment center untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan professionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

"Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia"

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			**3**	**3**	**-**	**-**	**6**

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
    - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
    - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja

(3) Belanja

a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
  - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
  - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
  - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
  - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
  - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester I TA 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.081.139.000	1.047.500.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	**1.081.139.000**	**1.047.500.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	20.230.189.000	20.351.989.000
Belanja Barang	93.856.547.000	101.913.879.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	5.479.000.000	9.309.225.000
Jumlah Belanja	**119.565.736.000**	**131.575.093.000**

Realisasi Pendapatan Rp527.857.072,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp527.857.072,00 atau mencapai 50.39% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.047.500.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

BPSDM Hukum dan HAM per 30 Juni 2022

Uraian	30 Juni 2022		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	60.000.000	5.258.000	8,76
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	-	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	0
Pendapatan Lain-Lain	-	522.599.072	0
Jumlah	**1.047.500.000**	**527.857.072**	**50,39**

Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM antara lain :

a. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari penjualan peralatan dan mesin, juga atas sewa tanah, gedung dan bangunan.
b. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berasal dari Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
c. Pendapatan Lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Pendapatan

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	5.258.000	81.427.478	(93,54)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	-	987.500.000	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	-	14.482.017	100,00
Pendapatan Lain-lain	522.599.072	324.682.788	60,96
Jumlah	**527.857.072**	**1.408.092.283**	**-62,51**

Realisasi Pendapatan 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 62,51% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan belum terealisasi.

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp5.258.000,00 terdiri dari:
   - Realisasi pada Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.200.000,00 atas penjualan bongkaran gedung milik BPSDM Hukum dan HAM.
   - Realisasi Akun [425131] Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp3.579.286,00 terdiri dari satker BPSDM atas sewa ruang kantin.

b. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp522.599.072,00 yang terdiri dari :
   - Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp4.161.600,00 tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai Pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2020 a.n Nur Afdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp518.437.472,00 berupa :
    1. Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Infrastruktur Parkir *Landscape* dan *Drop Off* Gedung Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya Rp12.879.763,00.
    2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM Rp51.372.727,00 yang terdiri dari:
        a. Pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp9.036.363,23;
        b. Pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang sebesar Rp42.336.363,64.
    3. Setoran Temuan BPK Rp454.184.982,00 yang terdiri dari Kekurangan volume pekerjaan Gedung Auditorium sebesar Rp348.927.215,62 dan Gedung Olahraga sebesar Rp105.257.766,09.

Realisasi Belanja Rp39.559.064.706,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp39.559.064.706,00 atau 30,07% dari anggaran belanja sebesar Rp131.575.093.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA. 2022

Uraian	TA 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	20.351.989.000	9.262.836.239	45,51
Belanja Barang	101.913.879.000	26.384.002.467	25,89
Belanja Modal	9.309.225.000	3.912.226.000	42,03
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**131.575.093.000**	**39.559.064.706**	**30,066**
Pengembalian Belanja	-	767.223	-
Total Belanja	**131.575.093.000**	**39.559.831.929**	**30,07**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Dibandingkan dengan 30 Juni TA. 2021, Realisasi Belanja pada 30 Juni TA. 2022 mengalami penurunan sebesar 62,51%. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2022 tidak sebesar Tahun Anggaran 2021. Peningkatan realisasi terjadi pada Belanja Barang yang berupa belanja modal pembelian *software* serta belanja peralatan dan mesin. Berikut perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2022 dengan realisasi belanja per 30 Juni 2021 :

Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Relisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.262.836.239	11.118.343.174	(16,69)
Belanja Barang	26.384.002.467	20.639.202.649	27,83
Belanja Modal	3.912.226.000	20.835.482.109	(81,22)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**39.559.064.706**	**52.593.027.932**	**(24,78)**

Belanja Pegawai
Rp9.262.836.239,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni TA. 2022 dan 30 Juni TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.262.836.239,00 dan Rp11.118.343.174,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.262.836.239	10.812.929.174	(14,34)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	305.414.000	-
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah	**9.262.836.239**	**11.118.343.174**	**(16,69)**

Realisasi belanja pegawai 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 16.69% dibandingkan 30 Juni TA 2021.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

per 30 Juni 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12.369.021.000	6.471.111.460	-	6.471.111.460	52,32
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200.000	94.545	2.223	92.322	47,27
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	891.886.000	411.706.208	-	411.706.208	46,16
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	204.897.000	106.387.232	-	106.387.232	51,92
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	711.890.000	332.325.000	-	332.325.000	46,68
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.139.870.000	562.981.000	-	562.981.000	49,39
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	69.534.000	47.545.657	-	47.545.657	68,38
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	693.525.000	319.227.360	-	319.227.360	46,03
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.075.649.000	847.325.000	-	847.325.000	27,55
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	405.320.000	164.135.000	-	164.135.000	40,50
512211	Belanja Uang Lembur	758.397.000	-	-	-	-
		20.320.189.000	**9.262.838.462**	**2.223**	**9.262.836.239**	**99.27**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2022 yang disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT. Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp2.223,00 yang merupakan biaya pembulatan gaji PNS.

Belanja Barang

Rp26.384.767.467,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA. 2022 dan 30 Juni TA. 2021 adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

masing-masing sebesar Rp26.384.767.467,00 dan Rp20.639.202.649,00. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang satker BPSDM Hukum dan HAM per 30 Juni TA. 2022 mengalami kenaikan sebesar 27,84% dari 30 Juni TA. 2021. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 sebesar 25,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp101.913.879.000,00. Hal ini disebabkan pelaksanaan diklat yang awalnya direncanakan secara klasikal justru diselenggarakan secara *online* sehingga tidak bisa merealisasikan belanja barang keperluan penyelenggaraan diklat tersebut. Berikut tabel perbandingan realisasi belanja barang BPSDM Hukum dan HAM per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 :

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	5.805.178.824	4.443.084.379	30,66
Belanja Barang Non Operasional	3.706.170.994	2.352.763.951	57,52
Belanja Persediaan	288.680.273	311.918.847	(7,45)
Belanja Jasa	9.906.545.498	5.989.030.509	65,41
Belanja Pemeliharaan	4.643.263.051	4.326.524.845	7,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.034.928.827	3.215.880.118	(36,72)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	-	-	-
Jumlah	**26.384.767.467**	**20.639.202.649**	**27,84**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
5211	Belanja Barang Operasional	12.830.722.000	5.805.178.824	-	5.805.178.824	4.443.084.379	30,66
5212	Belanja Barang Non Operasional	21.609.351.000	3.706.170.994	-	3.706.170.994	2.352.763.951	57,52
5218	Belanja Persediaan	1.367.600.000	288.680.273	-	288.680.273	311.910.000	(7,45)
5221	Belanja Jasa	19.844.127.000	9.906.545.498	765.000	9.905.780.498	5.989.030.509	65,40
5231	Belanja Pemeliharaan	14.608.816.000	4.643.263.051	-	4.643.263.051	4.326.524.845	7,32
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.653.263.000	2.034.928.827	-	2.034.928.827	3.215.880.118	(36,72)
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**101.913.879.000**	**26.384.767.467**	**765.000**	**26.384.002.467**	**20.639.193.802**	**27,83**

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi belanja barang yang disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan dikarenakan pandemi *Covid-19* dan pelaksanaan diklat yang dilakukan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sepanjang tahun 2022.

Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 per 30 Juni 2022

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	1.352.210.000	869.839.100	-	869.839.100	64,33
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	2.300.031.000	440.614.376	-	440.614.376	19,16
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.385.666.000	1.149.694.000	-	1.149.694.000	48,19
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-	-	-	-	-	-
Jumlah		**6.037.907.000**	**2.460.147.476**	**0**	**2.460.147.476**	**41**

Dalam hal penanganan pandemi *Covid-19* BPSDM Hukum dan HAM mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp6.037.907.000,00. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi *Covid-19* terserap sebesar Rp2.460.147.476,00 atau sebesar 41% dari anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja Modal

Rp3.912.226.000,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.912.226.000,00 dan Rp20.835.482.109,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni TA.2022 dan 30 Juni TA. 2021 mengalami penurunan sebesar 81,22% dibandingkan 30 Juni TA. 2021. Berikut tabel perbandingan realisasi belanja modal satker BPSDM Hukum dan HAM per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.813.226.000	450.433.500	746,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	20.385.048.609	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	99.000.000	0	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah	**3.912.226.000**	**20.835.482.109**	**-81,22**

Penurunan realisasi belanja modal disebabkan tidak adanya penambahan atas Gedung dan Bangunan yang mana pada tahun lalu sebesar Rp20.385.048.609,00.

Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.919.225.000	3.813.226.000	-	3.813.226.000	450.433.500	746,57
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	20.385.048.609	(100,00)
5361	Belanja Modal Lainnya	390.000.000	99.000.000	-	99.000.000	0	0,00
	Jumlah	**9.309.225.000**	**3.912.226.000**	**-**	**3.912.226.000**	**20.835.482.109**	**-81,22**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja Modal Tanah

Rp0,00

B.2.4 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 30 Juni TA. 2022 dan 30 Juni TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-		
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp3.813.226.000,00

B.2.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp3.813.226.000,00, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 30 Juni TA 2021 sebesar Rp450.433.500,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.813.226.000	450.433.500	746,57
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	0
Belanja Modal BLU	-	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	**3.813.226.000**	**450.433.500**	**746,57**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**3.813.226.000**	**450.433.500**	**746,57**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

B.2.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA. 2022 dan 30 Juni TA.2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.385.048.609,00. Terjadi penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA. 2022 disebabkan tidak adanya penambahan gedung dan bangunan hingga 30 Juni 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	20.385.048.609	-100
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah	**0**	**20.385.048.609**	**-100,00**

Terjadi penurunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bagunan pada TA. 2022 disebabkan tidak adanya penambahan gedung dan bangunan hingga 30 Juni 2022 sedangkan pada TA. 2021 terdapat pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp93.636.985.363,00 di Tangerang atas pembangunan gedung olahraga dan Auditorium Politeknik.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

B.2.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni TA.2022 dan 30 Juni TA.2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	0%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**0%**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0%
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**0%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja Modal Lainnya Rp99.000.000,00

B.2.8 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA. 2022 dan 30 Juni TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp99.000.000,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jalan, irigasi, jaringan dan lain-lain.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0
Belanja *Software*	99.000.000	163.500.000	61
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	0
Belanja Modal BLU	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	**99.000.000**	**163.500.000**	**61**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
Jumlah Belanja	**99.000.000**	**163.500.000**	**61**

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2022 sebesar Rp99.000.000,00 berupa belanja pembelian modul penilaian kompetensi pada aplikasi Rumah Belajar. Realisasi semester ini mengalami penurunan sebesar 61% dibandingkan 30 Juni 2021 yang mana realisasi berupa belanja *software*.

Belanja Bantuan Sosial Rp0,00

B.2.9 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp300.000.000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA. 2022 dan 31 Desember TA. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Rekening Bank	-	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	300.000.000	-
Jumlah	**300.000.000**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp733.082.692,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing sebesar Rp733.082.692,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas dalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas

per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	733.082.692	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**733.082.692**	**-**

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp733.082.692,00 merupakan saldo LS Bendahara di bank dan tunai.

Piutang PNBP

Rp65.300,00

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP

per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Piutang PNBP	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	65.300	-
Jumlah	**65.300**	**-**

Piutang bukan pajak pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.65.300,00 disebabkan potongan gaji (pada saat dibuat SPM bulan Juni timbul Piutang Lainnya di Debit senilai Rp65.300,00. Sehingga memunculkan saldo debit di Laporan Neraca, tetapi pada saat terbit SP2D nanti tanggal 1 bulan juli otomatis akan memunculkan piutang di Kredit sehingga saling mengeliminasi antar piutang.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Nama	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA

Rp0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Lancar

Rp0,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar

per 30 Juni 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-		-

Beban Dibayar di Muka

Rp0,00

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni TA. 2022 dan 31 Desember TA. 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka

30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

Persediaan Rp325.498.612,,00

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp325.498.612,00 dan Rp280.464.984,00.

Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan

30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

JENIS	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Barang Konsumsi	253.999.927	228.547.384
Barang untuk Pemeliharaan	67.248.685	51.917.600
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	4.250.000	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**325.498.612**	**280.464.984**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (*stock opname* persediaan) terlampir.

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran
Rp0,00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non Lancar per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp687.998.681.000,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp687.998.681.000,00 dan Rp687.998.681.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m^2 terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m^2 terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Aset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.
- Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m2 akibat pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00 (masih dalam proses penggantian)

Peralatan dan Mesin
Rp71.617.722.672,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp71.617.722.672,00 dan Rp60.088.946.105,00 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	**Rp**	**60.088.946.105**
Mutasi tambah:	Rp	12.214.522.567
Pembelian	Rp	12.214.522.567
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	685.746.000
Transfer keluar	Rp	-
Reklasifikasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	685.746.000
Saldo per 30 Juni 2022	**Rp**	**71.617.722.672**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	Rp	(41.655.283.326)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**Rp**	**29.962.439.346**

Mutasi Tambah mencakup pembelian mesin-mesin, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp12.214.522.567,00 yang merupakan pembelian peralatan dan mesin.

- Pembelian Alat Bantu untuk mendukung operasional kantor senilai Rp59.820.000,00 berupa 4 unit pompa air.
- Sebesar Rp100.160.000,00 berupa 4 unit Pompa Lumpur yang diperoleh dari hasil koreksi nilai berkurang dan penambahan saldo awal Gedung Auditorium dan Gedung Olahraga Politeknik Tangerang.
- Pembelian alat angkutan darat bermotor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp644.000.000,00 pada BPSDM Hukum dan HAM berupa 1 unit mobil sedan.
- Penambahan Alat Bengkel Tak Bermesin untuk mendukung operasional kantor senilai Rp240.309.700,00 akibat hasil koreksi nilai berkurang dan penambahan saldo awal Gedung Auditorium dan Gedung Olahraga Politeknik Tangerang berupa 6 unit Mesin Pompa Air PMK.
- Penambahan Alat Bengkel Tak Bermesin untuk mendukung operasional kantor senilai Rp299.195.000,00 berupa 2 unit CCTV.
- Pembelian Alat Kantor untuk mendukung operasional kantor senilai Rp520.920.000,00 berupa 175 unit lemari kayu.
- Pengembangan Nilai Aset senilai Rp55.286.100 berupa 1 unit *Sound System.*
- Penambahan Alat Rumah Tangga untuk mendukung operasional kantor sebesar Rp3.890.388.400,00 akibat hasil koreksi nilai berkurang dan penambahan saldo awal Gedung Auditorium dan Gedung Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Politeknik Tangerang berupa 3 unit *Sound System* dan 3 unit Televisi.

- Pembelian Alat Rumah Tangga untuk mendukung operasional kantor senilai Rp1.671.340.900,00.
- Penambahan Alat Studio untuk mendukung operasional kantor sebesar Rp3.871.243.467,00 berupa 2 unit LCD Monitor.
- Pembelian Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp619.685.000,00
- Pembelian Peralatan Komputer untuk mendukung operasional kantor senilai Rp240.250.000,00 berupa 34 unit printer dan 9 unit scanner.

Mutasi Kurang merupakan penghapusan kendaraan berupa 2 unit Bus berkapasitas 15-29 orang sebesar Rp685.746.000,00.

Gedung dan Bangunan Rp280.926.097.070,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah Rp280.926.097.070,00 dan Rp292.291.425.798,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**292.291.425.798**
Mutasi tambah:	30.117.966.823
Penerimaan Aset Tetap/ Renovasi	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	30.117.966.823
Mutasi kurang:	41.483.295.551
Reklasifikasi Gd dan Bangunan	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	41.483.295.551
Saldo per 30 Juni 2022	**280.926.097.070**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(32.605.216.605)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**248.320.880.465**

Mutasi tambah sebesar Rp30.117.966.823,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa 1 unit Bangunan Gedung Olahraga Tertutup permanen dan 1 unit Bangunan Rumah Genset.

Mutasi kurang sebesar Rp41.483.295.551,00 merupakan koreksi atas Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari hasil Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 yang terletak di Tangerang (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang) tersebut dirubah menjadi beberapa aset tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.359.677.154,00

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp12.359.677.154,00 dan Rp9.395.644.993,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**9.395.644.993**
Mutasi tambah:	-
Pengembangan	2.964.032.161
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2022	**12.359.677.154**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(5.409.584.425)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**6.950.092.729**

Mutasi tambah sebesar Rp2.964.032.161,00 berasal dari renovasi jalan khusus komplek yang menambah nilai jalan pada Politeknik di Tangerang.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.351.026.622,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah Rp1.351.026.622,00.

Saldo per 01 Januari 2022	**1.351.026.622**
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2022	**1.351.026.622**
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2022	(18.480.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**1.332.546.622**

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp1.351.026.622,00 milik Satker BPSDM Hukum dan HAM yang terdiri dari :

1. Monografi sebesar Rp717.668.957,00 sebanyak 4.777 buah karya tulis.
2. Referensi sebesar Rp108.869.635,00 berupa Buku Referensi Widyaiswara.
3. Buku Lainnya sebesar Rp452.788.030,00 berupa koleksi buku yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dimiliki perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM.

4. Naskah/Manuskrip Berbahan Kertas sebesar Rp48.220.000,00 berupa leaflet, banner, kalender.
5. Alat Musik Modern/Band sebesar Rp18.480.000,00 berupa instrument organ/keyboard sebanyak 1 buah.
6. Pahatan Logam sebesar Rp5.000.000,00 sebanyak 1 buah.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca berupa pembangunan Gedung Auditorium di Tangerang.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp79.688.564.356,00

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing Rp79.688.564.356,00 dan Rp63.118.502.720,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	60.088.946.105	41.655.283.326	18.433.662.779
2	Gedung dan Bangunan	292.291.425.798	32.605.216.605	259.686.209.193
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.644.993	5.409.584.425	3.986.060.568
4	Aset Tetap Lainnya	1.351.026.622	18.480.000	1.332.546.622
Total		**363.127.043.518**	**79.688.564.356**	**283.438.479.162**

Aset Tak Berwujud
Rp1.189.352.500,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.189.352.500,00 dan Rp1.090.352.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Komputer	Rp	1.189.352.500
2	ATB Lainnya	Rp	-
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2022		Rp	1.189.352.500

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**Rp**	**1.090.352.500**
Mutasi tambah:	Rp	99.000.000
Pembelian	Rp	99.000.000
Transfer Masuk	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	**Rp**	**1.189.352.500**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	Rp	582.910.500
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**Rp**	**606.442.000**

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp1.953.802.990,00 yang dicatat sebagai aset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp926.852.500,00 berupa :
  a. *Barcode* : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi kediklatan sebesar Rp81.875.000,00
  b. Modul aplikasi *Self assesment* Rumah Belajar ASN Rp88.350.000,00
  c. Modul aplikasi *Self Service* Rumah Belajar ASN Rp83.900.000,00
  d. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp88.800.000,00
  e. Modul Aplikasi *Learning Journey* Rp90.090.000,00
  f. Modul *Digital Library* Rp87.780.000,00
  g. Aplikasi *E-learning* Rp90.502.000,00
  h. Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp93.857.000,00
  i. Modul *community of Practive* Rp88.660.000,00
  j. Modul aplikasi rumah belajar ASN Rp82.445.000,00
  k. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp50.593.500,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Adapun mutasi tambah pada Aset Tak Berwujud berupa pembelian *software* yaitu sebesar Rp99.000.000,00 berupa modul penilaian kompetensi Rumah Belajar Kemenkumham.

Aset Lain-Lain

Rp5.693.074.104,00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah Rp5.693.074.104,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Perbandingan Aset Lain-lain
per 30 Juni 2022 dam 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	5.693.074.104	5.693.074.104
Jumlah	**5.693.074.104**	**5.693.074.104**

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**5.693.074.104**
Mutasi tambah:	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2022	**5.693.074.104**
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2022	(4.319.477.711)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**1.373.596.393**

Aset Lain-lain pada BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari :

- Alat angkutan darat bermotor sebanyak 10 unit sebesar Rp589.786.000,00.
- Alat kantor sebanyak 199 unit senilai Rp1.966.627.282,00.
- Alat rumah tangga sebanyak 463 unit senilai Rp296.380.800,00.
- Alat studio sebanyak 9 unit senilai Rp10.957.650,00.
- Alat komunikasi sebanyak 3 unit senilai Rp12.642.500,00.
- Alat kedokteran sebanyak 2 unit senilai Rp 162.000,00.
- Komputer unit sebanyak 92 unit senilai Rp861.026.774,00.
- Peralatan komputer sebanyak 19 unit senilai Rp10.503.882,00.
- Unit peralatan proses/produksi sebanyak 1 unit senilai Rp18.635.000,00.
- Bangunan gedung tempat kerja sebanyak 2 gedung senilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rp531.865.216,00.

- Bangunan gedung tempat tinggal sebanyak 9 gedung senilai Rp1.394.712.00,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp4.902.388.211,00

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.902.388.211,00 dan Rp4.729.673.047,00 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Lain-lain	5.693.074.104	4.319.477.711	1.373.596.393
1	*Software* Komputer	1.090.352.500	582.910.500	507.442.000
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		**6.783.426.604**	**4.902.388.211**	**1.881.038.393**
B	Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**
Total		**6.783.426.604**	**4.902.388.211**	**1.881.038.393**

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp3.968.555.680,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing sebesar Rp3.968.555.680,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 2.409.281.554
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 826.191.434
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 733.082.692
Total		**Rp 3.968.555.680**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya [212191] sebesar Rp733.082.692,00 dikarenakan belanja pegawai bulan Juli yang sudah didebitkan pada Juni 2022, namun pada 1 Juli akan secara otomatis tercatat sebagai belanja pegawai sehingga akan mengeliminasi akun Utang Pihak Ketiga tersebut.

Adapun rincian dari utang kepada pihak ketiga antara lain :

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp 2.409.281.554,00 merupakan pembayaran Gaji Induk Bulan Juli serta Gaji ke-13 Pegawai yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nya terbit bulan Juli.
- Satker BPSDM sebesar Rp3.968.555.680,00.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp826.191.434,00 merupakan pembayaran Honor PPNPN bulan Juli yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2Dnya terbit bulan Juli.
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) sebesar Rp733.082.692,00 merupakan pembayaran LS bendahara yang SPPnya terbit pada bulan Juni dan SP2D nyaterbit bulan Juli

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp721.867.694,00

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Nilai Utang Yang belum ditagihkan pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp721.867.694,00 yang disebabkan oleh GU/GU KKP yang belum dibuat SPj belum dibuat SPM GUP) oleh bendahara.

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

per 30 Juni 2022

Kode Akun	Uraian	Jumlah	Penjelasan
218111	Utang Yang Belum Ditagihkan	Rp 721.867.694	GU belum dibuat SPj
	Total	**Rp 721.867.694**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0,00

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp7.452.099,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan dari sewa ruang ATM. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

per 30 Juni 2022

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -	
Badan Lainnya	Rp -	
Total	**Rp -**	

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2022 sebesar Rp0,00 merupakan utang pajak atas belanja pegawai yang belum disetorkan ke kas negara dan masih dipegang oleh bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ekuitas
Rp972.912.901.785,00

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp972.912.901.785,00 dan Rp982.967.752.039,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp10.575.399,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp10.575.399,00 dan Rp1.021.611.173,00. Berikut rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2022 dan 2021:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA. 2022 dan TA. 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan bagian Pemerintah Atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10.575.399	1.021.611.173	9.660,26
Jumlah	10.575.399	1.021.611.173	9.660,26

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya [425131] sebesar Rp10.575.399,00 berasal dari penerimaan atas pendapatan dari setoran sewa flat, kantin, dan sewa ruang mesin ATM BPSDM Hukum dan HAM.

Beban Pegawai
Rp11.672.117.793,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.672.117.793,00 dan Rp11.118.343.174,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021
Beban Gaji Pokok PNS	8.296.302.980	7.557.982.140
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-2.223	-69
Beban Pembultan Gaji PNS	122.596	117.233
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	528.658.188	489.325.334
Beban Tunjangan Anak PNS	136.174.686	117.983.362
Beban Tunjangan Struktural PNS	434.125.000	410.050.000
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural PNS	0	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	734.631.000	618.840.000
Beban Tunjangan PPh PNS	77.231.766	75.712.214
Beban Tunjangan Beras PNS	408.448.800	372.093.960
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	-	-
Beban Uang Makan PNS	847.325.000	965.385.000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	209.100.000	205.440.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0
Beban Uang Lembur	-	305.414.000
Jumlah	**11.672.117.793**	**11.118.343.174**

Beban Persediaan Rp750.910.763,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp750.910.763,00 dan Rp528.676.392,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	734.358.663	528.676.392	38,91
Beban Persediaan Bahan Baku	16.552.100	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**750.910.763**	**528.676.392**	**42,04**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Beban Barang dan Jasa Rp20.302.046.001,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.302.046.001,00 dan Rp12.784.878.839,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan belanja jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	5.148.538.320	3.381.300.807	52
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	248.000	3.950.500	(94)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.700.000	142.740.000	(13)
Beban Barang Operasional Lainnya	403.402.849	413.501.100	(2)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	869.839.100	501.591.972	73
Beban Bahan	943.116.798	620.951.899	52
Beban Honor Output Kegiatan	519.150.000	109.875.000	372
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.863.729.000	1.463.096.050	27
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan	-	-	100
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	450.168.936	158.841.002	183
Beban Langganan Listrik	993.276.675	913.614.905	9
Beban Langganan Telepon	4.891.551	11.073.016	(56)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.597.970.782	810.869.088	344
Beban Sewa	1.676.505.000	1.426.678.500	18
Pengembalian Beban Jasa Profesi	- 765.000	-	100
Beban Jasa Profesi	2.557.579.990	2.752.025.000	(7)
Beban Jasa Lainnya	-	-	100
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.149.694.000	74.770.000	1.438
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	100
Jumlah	**20.302.046.001**	**12.784.878.839**	59

Beban Pemeliharaan Rp4.755.272.876,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.755.272.876,00 dan Rp4.243.803.140,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.836.186.950	3.161.394.650	21
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penangan	639.222.951	-	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	692.004.444	(100)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	279.862.975	390.404.046	100
Jumlah	**4.755.272.876**	**4.243.803.140**	**12**

Beban Perjalanan Dinas Rp2.071.621.827,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.071.621.827,00 dan Rp3.215.880.118,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.391.502.851	2.557.860.118	-45,60
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	324.300.000	174.800.000	85,53
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	28.200.000	-100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355.818.976	455.020.000	-21,80
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	100,00
Jumlah	**2.071.621.827**	**3.215.880.118**	**-35,58**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp5.252.500,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.252.500,00 dan Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.252.500,00 diakibatkan kesalahan pencatatan pada akun Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges [593121].

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	% Naik (Turun)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp9.587.909.906,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.587.909.906,00 dan Rp6.585.592.809,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.908.343.750	2.916.605.775	68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.918.033.462	3.118.340.982	26
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573.834.976	425.633.368	35
Beban Penyusutan Irigasi	9.904.429	9.904.429	-
Beban Penyusutan Jaringan	5.078.125	5.078.125	-
Beban Amortisasi Software	132.110.500	99.298.000	33
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	40.604.664	10.732.130	278
Jumlah	**9.587.909.906**	**6.585.592.809**	46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp0,00

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp524.799.079.00

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah Rp524.799.079,00 dan Rp403.824.176,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.200.000	79.141.388	-97,22
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	522.599.072	324.682.788	60,96
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**524.799.072**	**403.824.176**	**29,96**

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) pada Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp2.200.000,00.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp4.161.600,00, pada Satker BPSDM Hukum dan HAM. Penerimaan berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan September 2020 a.n Nur Afdin, S.Hum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM.
3. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp518.437.471,58. Penerimaan ini terdiri dari :
   - Pengembalian atas kelebihan pembayaran infrastruktur Parkir Landscape dan *Drop Off* Gedung Kelas POLTEKIM oleh PT. Jumba Jao Jaya sebesar Rp12.879.763,00.
   - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Akses Internet pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp 9.036.363,23 dan pekerjaan di BPSDM Hukum dan HAM dan sebesar Rp42.336.363,64 atas pekerjaan di POLITEKNIK Tangerang.
   - Setoran Temuan BPK berupa kekurangan volume pekerjaan gedung auditorium sebesar Rp348.927.215,62 dan gedung olahraga sebesar Rp105.257.766,09.

Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp982.967.752.039,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp982.967.752.039,00 dan Rp890.320.575.265,00.

Surplus/Defisit LO

(Rp48.609.757.195,00)

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah defisit sebesar (Rp48.609.757.195,00) dan (Rp37.051.739.123,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 sebesar Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp1.924.000 ,00)

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp1.924.000,00) dan Rp0,00. Koreksi Reklasifikasi Aset merupakan Reklasifikasi Masuk dari persediaan pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp. 1.924.000 berupa 4 unit Laser Pointer.

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp474.376.693,00

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp474.376.693,00 dan Rp821.246.555,00. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi didapat dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp474.376.693,00, berupa pengembalian atas kelebihan bayar konstruksi dalam pembangunan ruang kelas Politeknik di Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
391116	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	41.483.295.551	0	(41.483.295.551)
391116	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	414.832.956	(41.068.462.595)
391116	Saldo Awal Mesin Pompa Air PMK	0	38.500.000	(41.029.962.595)
391116	Saldo Awal Televisi	0	24.375.000	(41.005.587.595)
391116	Saldo Awal Mesin Pompa Air PMK	0	49.360.000	(40.956.227.595)
391116	Saldo Awal CCTV	0	138.035.000	(40.818.192.595)
391116	Saldo Awal *Sound System*	0	52.290.000	(40.765.902.595)
391116	Saldo Awal LCD Monitor	0	73.685.040	(40.692.217.555)
391116	Saldo Awal *Sound System*	0	3.764.423.400	(36.927.794.155)
391116	Saldo Awal *Sound System*	0	49.300.000	(36.878.494.155)
391116	Saldo Awal Bangunan Rumah Genset	0	1.250.327.100	(35.628.167.055)
391116	Saldo Awal Gedung Olahraga Tertutup Permanen	0	28.867.639.723	(6.760.527.332)
391116	Saldo Awal Mesin Pompa Air PMK	0	49.000.000	(6.711.527.332)
391116	Saldo Awal LCD Monitor	0	3.797.558.427	(2.913.968.905)
391116	Saldo Awal Mesin Pompa Air PMK	0	28.070.000	(2.885.898.905)
391116	Saldo Awal CCTV	0	161.160.000	(2.724.738.905)
391116	Saldo Awal Pompa Lumpur	0	100.160.000	(2.624.578.905)
391116	Saldo Awal Mesin Pompa Air PMK	0	75.379.700	(2.549.199.205)
391116	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks	0	2.964.032.161	414.832.956
391116	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan Khusus Kompleks	889.209.649	-	(474.376.693)
	TOTAL	**42.372.505.200**	**41.898.128.507**	**474.376.693**

Koreksi Lain-lain Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Transaksi Antar Entitas Rp39.031.207.634,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp39.031.207.634,00 dan Rp54.793.649.569,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(527.857.072)
Ditagihkan ke Entitas Lain	39.559.064.706
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**39.031.207.634**

DDEL/ DKEL Rp527.857.072,00 / Rp39.559.064.706,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni TA 2022, DDEL sebesar (Rp527.857.072,00) sedangkan DKEL sebesar Rp39.559.064.706,00.

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp.0,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 sebesar Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2022 adalah Rp0,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Ekuitas Akhir

Rp.972.902.901.785,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp972.902.901.785,00 dan Rp907.241.239.156,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Piutang Bukan Pajak [115212] sebesar Rp65.300,00 disebabkan potongan gaji (pada saat dibuat SPM bulan Juni timbul Piutang Lainnya di debit senilai Rp65.300,00. Sehingga memunculkan saldo debit di laporan neraca, tetapi pada saat terbit SP2D nanti tanggal 1 bulan Juli otomatis akan memunculkan piutang di kredit sehingga saling mengeliminasi antar piutang).
2. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.252.500,00 diakibatkan kesalahan pencatatan pada akun Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges [593121].
3. Utang Yang Belum Ditagihkan [218111] pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp721.867.694,00 yang disebabkan oleh GU/GU KKP yang belum dibuat SPj belum dibuat SPM GUP) oleh bendahara.
4. Utang kepada Pihak Ketiga [212111] sebesar Rp2.409.281.554,00 disebabkan belanja pegawai bulan Juli yang sudah didebitkan pada Juni 2022, namun pada 1 Juli akan secara otomatis tercatat sebagai Belanja Pegawai sehingga akan mengeliminasi akun Utang Pihak Ketiga tersebut.
5. Realisasi Belanja Modal Lainnya [536111] sebesar Rp99.000.000,00 merupakan realisasi berupa pembelian *software* modul pengembangan Rumah Belajar Kemenkumham.
6. Kas Lainnya dan setara Kas [111821] sebesar Rp733.375.485,00 merupakan saldo LS Bendahara di bank dan tunai.
7. Tindak lanjut temuan Itjen/BPK
    a. Barang Tidak Ditemukan berupa Gedung Perpustakaan dan Zitting Plaat masih menunggu reviu Inspektorat Jenderal, dimana hasil reviu Inspektorat Jenderal tersebut digunakan sebagai salah satu dokumen dalam usulan penghapusan Barang Tidak Ditemukan.
    b. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m2 akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp. 25.248.900.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain:

a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.

b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.

c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.

d. Capaian output strategis dan penjelasan *Refocusing* Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2022.

II LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2022		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	1.352.210.000	869.839.100	64,33
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	**1.352.210.000**	**869.839.100**	**64,33**
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	2.300.031.000	440.614.376	19,16
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	**2.300.031.000**	**440.614.376**	**64,33**
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	**-**	**-**	**64,33**
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.385.666.000	1.149.694.000	48,19
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	**2.385.666.000**	**1.149.694.000**	**64,33**
5231	Belanja Perjalanan Dalam Negeri			
524115	Belanja Perjalanan Dalam Negeri - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	**-**	**-**	0,00
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada			
526322	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	**-**	**-**	0,00
	JUMLAH BELANJA	**6.037.907.000**	**2.460.147.476**	**40,75**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) Rp869.839.100,00.
- Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) Rp440.614.376,00.
- Realisasi Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp1.149.694.000,00.

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemi Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

KDUAPPAW : 013120100KP **BA(013) ES1(12) DKI JAKARTA**

KODE SATKER : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:29 PM
Tgl. Cetak 09/08/2022 9:27 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	733,082,692	0	733,082,692	0.00
Piutang Bukan Pajak	65,300	0	65,300	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	65,300	0	65,300	0.00
Persediaan	325,498,612	280,464,984	45,033,628	16.06
JUMLAH ASET LANCAR	**1,358,646,604**	**280,464,984**	**1,078,181,620**	**384.43**
ASET TETAP				
Tanah	687,998,681,000	687,998,681,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	71,617,722,672	60,088,946,105	11,528,776,567	19.19
Gedung dan Bangunan	280,926,097,070	292,291,425,798	(11,365,328,728)	(3.89)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,359,677,154	9,395,644,993	2,964,032,161	31.55
Aset Tetap Lainnya	1,351,026,622	1,351,026,622	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(79,688,564,356)	(70,484,738,921)	(9,203,825,435)	13.06
JUMLAH ASET TETAP	**974,564,640,162**	**980,640,985,597**	**(6,076,345,435)**	**(0.62)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,189,352,500	1,090,352,500	99,000,000	9.08
Aset Lain-lain	5,693,074,104	5,693,074,104	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,902,388,211)	(4,729,673,047)	(172,715,164)	3.65
JUMLAH ASET LAINNYA	**1,980,038,393**	**2,053,753,557**	**(73,715,164)**	**(3.59)**
JUMLAH ASET	**977,903,325,159**	**982,975,204,138**	**(5,071,878,979)**	**(0.52)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,968,555,680	0	3,968,555,680	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	721,867,694	0	721,867,694	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	7,452,099	(7,452,099)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**4,990,423,374**	**7,452,099**	**4,982,971,275**	**66,866.68**
JUMLAH KEWAJIBAN	**4,990,423,374**	**7,452,099**	**4,982,971,275**	**66,866.68**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	972,912,901,785	982,967,752,039	(10,054,850,254)	(1.02)
JUMLAH EKUITAS	**972,912,901,785**	**982,967,752,039**	**(10,054,850,254)**	**(1.02)**
JUMLAH EKUITAS	**972,912,901,785**	**982,967,752,039**	**(10,054,850,254)**	**(1.02)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**977,903,325,159**	**982,975,204,138**	**(5,071,878,979)**	**(0.52)**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:23 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 9:28 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	733,082,692	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	65,300	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	253,999,927	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	67,248,685	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	4,250,000	0
0.0	131111	Tanah	687,998,681,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	71,617,722,672	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	280,926,097,070	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,351,026,622	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	41,655,283,326
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	32,605,216,605
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,439,755,085
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	99,044,290
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	870,785,050
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	18,480,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,189,352,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,693,074,104	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	4,319,477,711
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	582,910,500
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,409,281,554
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	826,191,434
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	733,082,692
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	721,867,694
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	300,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	39,559,064,706
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	527,857,072	0
0.0	391111	Ekuitas	0	982,967,752,039

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:23 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 9:28 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	474,376,693	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1,924,000	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,575,399
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,161,600
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	518,437,472
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,296,302,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	122,596	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,223
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	528,658,188	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	136,174,686	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	434,125,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	734,631,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	77,231,766	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	408,448,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	847,325,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	209,100,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,148,538,320	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	248,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124,700,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	403,402,849	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	869,839,100	0
3.0	521211	Beban Bahan	943,116,798	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	519,150,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,863,729,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	450,168,936	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	993,276,675	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,891,551	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,597,970,782	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,676,505,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,557,579,990	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	765,000
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,149,694,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,836,186,950	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	639,222,951	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,391,502,851	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	324,300,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355,818,976	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:23 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 9:28 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,908,343,750	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,918,033,462	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573,834,976	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	132,110,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	40,604,664	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	734,358,663	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	279,862,975	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	5,252,500	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	16,552,100	0
JUMLAH			**1,112,644,334,380**	**1,112,644,334,380**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:29 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 9:29 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	39,559,064,706
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	527,857,072	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,058,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,161,600
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	518,437,472
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,471,111,460	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	94,545	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,223
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	411,706,208	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	106,387,232	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	332,325,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	562,981,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	47,545,657	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	319,227,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	847,325,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	164,135,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,406,988,875	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	248,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	124,700,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	403,402,849	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	869,839,100	0
3.0	521211	Belanja Bahan	888,077,618	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	513,750,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,863,729,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	440,614,376	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	173,768,772	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	114,911,501	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	993,276,675	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,891,551	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,597,970,782	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,660,032,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,679,990	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	765,000
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,149,694,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,442,246,950	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	561,793,150	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	639,222,951	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : 108266 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data 08/08/22 9:29 PM

Tgl. Cetak 09/08/2022 9:29 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,372,509,851	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	306,600,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	355,818,976	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,813,226,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	99,000,000	0
JUMLAH			**40,087,689,001**	**40,087,689,001**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

SATUAN KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 108266

Waktu Olap: 2022-08-08 21:28:24.0 [B@ce3af06

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 09/08/22 9:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,047,500,000	527,857,072	519,642,928	50	1,081,139,000	1,408,092,283	(326,953,283)	130
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,047,500,000	527,857,072	519,642,928	50	1,081,139,000	1,408,092,283	(326,953,283)	130
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	20,351,989,000	9,262,836,239	11,089,152,761	46	17,471,711,000	11,118,343,174	6,353,367,826	64
	BELANJA BARANG	101,913,879,000	26,384,002,467	75,529,876,533	26	74,327,635,000	20,639,202,649	53,688,432,351	28
	BELANJA MODAL	9,309,225,000	3,912,226,000	5,396,999,000	42	178,530,437,000	20,835,482,109	157,694,954,891	12
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	131,575,093,000	39,559,064,706	92,016,028,294	30	270,329,783,000	52,593,027,932	217,736,755,068	19
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0199**	**BA(013) ES1(12) DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,369,021,000	12,369,021,000	6,471,111,460	0	6,471,111,460	52.32	5,897,909,540
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200,000	200,000	94,545	2,223	92,322	47.27	107,678
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	891,886,000	891,886,000	411,706,208	0	411,706,208	46.16	480,179,792
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	204,897,000	204,897,000	106,387,232	0	106,387,232	51.92	98,509,768
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	711,890,000	711,890,000	332,325,000	0	332,325,000	46.68	379,565,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,139,870,000	1,139,870,000	562,981,000	0	562,981,000	49.39	576,889,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	69,534,000	69,534,000	47,545,657	0	47,545,657	68.38	21,988,343
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	693,525,000	693,525,000	319,227,360	0	319,227,360	46.03	374,297,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,075,649,000	3,075,649,000	847,325,000	0	847,325,000	27.55	2,228,324,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	405,320,000	405,320,000	164,135,000	0	164,135,000	40.5	241,185,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,561,792,000	19,561,792,000	9,262,838,462	2,223	9,262,836,239	47.35	10,298,955,761
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	758,397,000	790,197,000	0	0	0	0	790,197,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	758,397,000	790,197,000	0	0	0	0	790,197,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	20,320,189,000	20,351,989,000	9,262,838,462	2,223	9,262,836,239	45.51	11,089,152,761
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,724,722,000	10,069,692,000	4,406,988,875	0	4,406,988,875	43.76	5,662,703,125
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000,000	20,400,000	248,000	0	248,000	1.22	20,152,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	339,480,000	339,480,000	124,700,000	0	124,700,000	36.73	214,780,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,030,620,000	1,048,940,000	403,402,849	0	403,402,849	38.46	645,537,151
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,375,250,000	1,352,210,000	869,839,100	0	869,839,100	64.33	482,370,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,490,072,000	12,830,722,000	5,805,178,824	0	5,805,178,824	45.24	7,025,543,176
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,847,280,000	9,816,894,000	888,077,618	0	888,077,618	9.05	8,928,816,382
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,741,800,000	1,380,080,000	513,750,000	0	513,750,000	37.23	866,330,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,220,843,000	8,112,346,000	1,863,729,000	0	1,863,729,000	22.97	6,248,617,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	986,050,000	2,300,031,000	440,614,376	0	440,614,376	19.16	1,859,416,624
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,795,973,000	21,609,351,000	3,706,170,994	0	3,706,170,994	17.15	17,903,180,006
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	124,000,000	524,000,000	173,768,772	0	173,768,772	33.16	350,231,228
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	661,911,000	843,600,000	114,911,501	0	114,911,501	13.62	728,688,499
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	785,911,000	1,367,600,000	288,680,273	0	288,680,273	21.11	1,078,919,727

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0199**	**BA(013) ES1(12) DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 8:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,800,000,000	1,800,000,000	993,276,675	0	993,276,675	55.18	806,723,325
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	42,000,000	4,891,551	0	4,891,551	11.65	37,108,449
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,662,570,000	3,699,530,000	3,597,970,782	0	3,597,970,782	97.25	101,559,218
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
522141	Belanja Sewa	3,214,744,000	2,180,628,000	1,660,032,500	0	1,660,032,500	76.13	520,595,500
522151	Belanja Jasa Profesi	7,774,700,000	9,464,500,000	2,500,679,990	765,000	2,499,914,990	26.42	6,964,585,010
522191	Belanja Jasa Lainnya	459,433,000	201,803,000	0	0	0	0	201,803,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,731,990,000	2,385,666,000	1,149,694,000	0	1,149,694,000	48.19	1,235,972,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	18,685,437,000	19,844,127,000	9,906,545,498	765,000	9,905,780,498	49.92	9,938,346,502
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,221,920,000	11,997,836,000	3,442,246,950	0	3,442,246,950	28.69	8,555,589,050
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	910,000,000	996,355,000	561,793,150	0	561,793,150	56.38	434,561,850
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,656,425,000	1,614,625,000	639,222,951	0	639,222,951	39.59	975,402,049
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,788,345,000	14,608,816,000	4,643,263,051	0	4,643,263,051	31.78	9,965,552,949
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	26,874,760,000	25,208,430,000	1,372,509,851	0	1,372,509,851	5.44	23,835,920,149
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,234,200,000	2,092,250,000	306,600,000	0	306,600,000	14.65	1,785,650,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	226,824,000	0	0	0	0	226,824,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,201,849,000	4,125,759,000	355,818,976	0	355,818,976	8.62	3,769,940,024
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	32,310,809,000	31,653,263,000	2,034,928,827	0	2,034,928,827	6.43	29,618,334,173
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,856,547,000	101,913,879,000	26,384,767,467	765,000	26,384,002,467	25.89	75,529,876,533
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	8,919,225,000	3,813,226,000	0	3,813,226,000	42.75	5,105,999,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	8,919,225,000	3,813,226,000	0	3,813,226,000	42.75	5,105,999,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	390,000,000	99,000,000	0	99,000,000	25.38	291,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	390,000,000	99,000,000	0	99,000,000	25.38	291,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,479,000,000	9,309,225,000	3,912,226,000	0	3,912,226,000	42.03	5,396,999,000
	JUMLAH BELANJA	119,655,736,000	131,575,093,000	39,559,831,929	767,223	39,559,064,706	30.07	92,016,028,294

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	Kode Lap : LRA.P.E1.1
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	Tanggal : 09/08/22 8:46 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 0199**	**INSTANSI PUSAT**	Halaman : 1
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,200,000	0	2,200,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	60,000,000	3,058,000	0	3,058,000	5.1
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	60,000,000	5,258,000	0	5,258,000	8.76
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,161,600	0	4,161,600	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	518,437,472	0	518,437,472	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	522,599,072	0	522,599,072	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,047,500,000	527,857,072	0	527,857,072	50.39
	JUMLAH PENDAPATAN	1,047,500,000	527,857,072	0	527,857,072	50.39

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0199**	**BA(013) ES1(12) DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/08/22 9:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,375,250,000	1,352,210,000	869,839,100	0	869,839,100	64.33	482,370,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,375,250,000	1,352,210,000	869,839,100	0	869,839,100	64.33	482,370,900
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	986,050,000	2,300,031,000	440,614,376	0	440,614,376	19.16	1,859,416,624
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	986,050,000	2,300,031,000	440,614,376	0	440,614,376	19.16	1,859,416,624
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,731,990,000	2,385,666,000	1,149,694,000	0	1,149,694,000	48.19	1,235,972,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,731,990,000	2,385,666,000	1,149,694,000	0	1,149,694,000	48.19	1,235,972,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,093,290,000	6,037,907,000	2,460,147,476	0	2,460,147,476	40.75	3,577,759,524
	JUMLAH BELANJA	5,093,290,000	6,037,907,000	2,460,147,476	0	2,460,147,476	40.75	3,577,759,524

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 09/08/22 9:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 08/08/22 9:30 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,575,399	1,021,611,173	(1,011,035,774)	(98.965)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,575,399	1,021,611,173	(1,011,035,774)	(98.965)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,575,399	1,021,611,173	(1,011,035,774)	(98.965)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,672,117,793	11,118,343,174	553,774,619	4.981
Beban Persediaan	750,910,763	528,676,392	222,234,371	42.036
Beban Barang dan Jasa	20,302,046,001	12,784,878,839	7,517,167,162	58.797
Beban Pemeliharaan	4,755,272,876	4,243,803,140	511,469,736	12.052
Beban Perjalanan Dinas	2,071,621,827	3,215,880,118	(1,144,258,291)	(35.581)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5,252,500	0	5,252,500	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 09/08/22 9:26 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 08/08/22 9:30 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,587,909,906	6,585,592,809	3,002,317,097	45.589
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	49,145,131,666	38,477,174,472	10,667,957,194	27.725
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(49,134,556,267)	(37,455,563,299)	(11,678,992,968)	31.181
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	2,200,000	79,141,388	(76,941,388)	(97.22)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,200,000	79,141,388	(76,941,388)	(97.22)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	522,599,072	324,682,788	197,916,284	60.957
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	522,599,072	324,682,788	197,916,284	60.957
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	524,799,072	403,824,176	120,974,896	29.957
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(48,609,757,195)	(37,051,739,123)	(11,558,018,072)	31.194
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(48,609,757,195)	(37,051,739,123)	(11,558,018,072)	31.194

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	
SATUAN KERJA	**: 108266**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Tgl Data : 08/08/22 9:30 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	982,967,752,039	890,320,575,265	92,647,176,774	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(48,609,757,195)	(37,051,739,123)	(11,558,018,072)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(476,300,693)	(821,246,555)	344,945,862	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(1,924,000)	0	(1,924,000)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(474,376,693)	(821,246,555)	346,869,862	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	39,031,207,634	54,793,649,569	(15,762,441,935)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(10,054,850,254)	16,920,663,891	(26,975,514,145)	-
EKUITAS AKHIR	972,912,901,785	907,241,239,156	65,671,662,629	-

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

POSISI PER TANGGAL 30-JUNI-2022

TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 - BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Kode Lap : LBNST

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	U R A I A N	
131111	Tanah	687,998,681,000
132111	Peralatan dan Mesin	71,617,722,672
133111	Gedung dan Bangunan	280,926,097,070
134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	1,351,026,622
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41,655,283,326)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(32,605,216,605)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4,439,755,085)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(99,044,290)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(870,785,050)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(18,480,000)
162151	Software	1,189,352,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,693,074,104
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(4,319,477,711)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(582,910,500)
J U M L A H		976,544,678,555

Penanggung Jawab UAKPB

LAPORAN PENYUSUTAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2022			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
131111	Tanah		100,350	687,998,681,000	0	687,998,681,000
20101	TANAH PERSIL		100,350	687,998,681,000	0	687,998,681,000
132111	Peralatan dan Mesin		8,760	71,617,722,672	41,655,283,326	29,962,439,346
30101	ALAT BESAR DARAT		7	221,856,000	79,335,604	142,520,396
30103	ALAT BANTU		54	913,617,820	357,759,215	555,858,605
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		28	3,051,866,000	2,084,008,858	967,857,142
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		12	40,373,000	40,373,000	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN		9	71,000,000	34,350,000	36,650,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		6	240,309,700	24,030,970	216,278,730
30501	ALAT KANTOR		985	6,971,435,900	4,632,088,338	2,339,347,562
30502	ALAT RUMAH TANGGA		6,105	33,158,112,398	16,806,770,787	16,351,341,611
30601	ALAT STUDIO		158	10,015,257,301	4,712,975,359	5,302,281,942
30602	ALAT KOMUNIKASI		115	866,610,750	835,960,750	30,650,000
30603	PERALATAN PEMANCAR		12	210,668,800	99,334,720	111,334,080
30701	ALAT KEDOKTERAN		54	574,095,000	550,610,000	23,485,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM		1	12,306,000	12,306,000	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM		11	224,539,500	90,254,244	134,285,256
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		4	4,725,000	4,449,999	275,001
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		3	473,597,400	473,597,400	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		1	38,100,000	38,100,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		763	11,579,068,347	8,374,341,762	3,204,726,585
31002	PERALATAN KOMPUTER		411	2,322,812,756	1,831,455,759	491,356,997
31301	SUMUR		8	117,197,000	87,897,750	29,299,250
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN		1	199,292,000	199,292,000	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		7	210,264,000	194,514,000	15,750,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		2	46,750,000	39,607,144	7,142,856
31901	PERALATAN OLAH RAGA		3	53,868,000	51,869,667	1,998,333
133111	Gedung dan Bangunan		51	280,926,097,070	32,605,216,605	248,320,880,465
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		32	222,550,353,674	18,362,530,404	204,187,823,270
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		16	52,863,528,498	13,853,403,658	39,010,124,840
40401	TUGU/TANDA BATAS		3	5,512,214,898	389,282,543	5,122,932,355
134111	Jalan dan Jembatan		15,687	10,348,938,854	4,439,755,085	5,909,183,769
50101	JALAN		15,687	10,348,938,854	4,439,755,085	5,909,183,769
134112	Irigasi		1	831,972,000	99,044,290	732,927,710
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		1	831,972,000	99,044,290	732,927,710
134113	Jaringan		5	1,178,766,300	870,785,050	307,981,250
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK		2	406,250,000	98,268,750	307,981,250
50310	INSTALASI LAIN		3	772,516,300	772,516,300	0
135121	Aset Tetap Lainnya		5,576	1,351,026,622	18,480,000	1,332,546,622

LAPORAN PENYUSUTAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2022			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		5,573	1,279,326,622	0	1,279,326,622
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1	48,220,000	0	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN		1	18,480,000	18,480,000	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		1	5,000,000	0	5,000,000
162151	Software		16	1,189,352,500	582,910,500	606,442,000
80101	ASET TAK BERWUJUD		16	1,189,352,500	582,910,500	606,442,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		808	5,693,074,104	4,319,477,711	1,373,596,393
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		10	589,786,000	589,786,000	0
30501	ALAT KANTOR		199	1,966,627,282	1,966,627,282	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		462	296,155,800	296,155,800	0
30601	ALAT STUDIO		9	10,957,650	10,957,650	0
30602	ALAT KOMUNIKASI		3	12,642,500	12,642,500	0
30701	ALAT KEDOKTERAN		2	162,000	162,000	0
31001	KOMPUTER UNIT		92	861,026,774	861,026,774	0
31002	PERALATAN KOMPUTER		19	10,503,882	10,503,882	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1	18,635,000	18,635,000	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	531,865,216	254,255,483	277,609,733
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		9	1,394,712,000	298,725,340	1,095,986,660
J U M L A H				1,061,135,631,122	84,590,952,567	976,544,678,555

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN PENYUSUTAN

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2022			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
132111	Peralatan dan Mesin		2,873	899,338,858	657,252,509	242,086,349
30501	ALAT KANTOR		763	140,403,600	110,366,400	30,037,200
30502	ALAT RUMAH TANGGA		1,923	673,384,380	501,723,914	171,660,466
30601	ALAT STUDIO		39	31,024,998	12,544,998	18,480,000
30602	ALAT KOMUNIKASI		30	11,962,500	5,981,250	5,981,250
30701	ALAT KEDOKTERAN		4	470,000	470,000	0
31002	PERALATAN KOMPUTER		34	26,173,380	10,245,947	15,927,433
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		80	15,920,000	15,920,000	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	225,000	225,000	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		1	225,000	225,000	0
J U M L A H				899,563,858	657,477,509	242,086,349

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTERAN

Tanggal : 09/08/2022

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 - BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		100,350	687,998,681,000	0	0	0	0	100,350	687,998,681,000
2.01.01	TANAH PERSIL		100,350	687,998,681,000	0	0	0	0	100,350	687,998,681,000
132111	Peralatan dan Mesin		8,141	60,088,946,105	621	12,214,522,567	2	685,746,000	8,760	71,617,722,672
3.01.01	ALAT BESAR DARAT		7	221,856,000	0	0	0	0	7	221,856,000
3.01.03	ALAT BANTU		46	753,637,820	8	159,980,000	0	0	54	913,617,820
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		29	3,093,612,000	1	644,000,000	2	685,746,000	28	3,051,866,000
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK		12	40,373,000	0	0	0	0	12	40,373,000
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		9	71,000,000	0	0	0	0	9	71,000,000
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		0	0	6	240,309,700	0	0	6	240,309,700
3.05.01	ALAT KANTOR		808	6,151,320,900	177	820,115,000	0	0	985	6,971,435,900
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		5,750	27,539,172,998	355	5,618,939,400	0	0	6,105	33,158,112,398
3.06.01	ALAT STUDIO		156	6,144,013,834	2	3,871,243,467	0	0	158	10,015,257,301
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		115	866,610,750	0	0	0	0	115	866,610,750
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		12	210,668,800	0	0	0	0	12	210,668,800
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		54	574,095,000	0	0	0	0	54	574,095,000
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		1	12,306,000	0	0	0	0	1	12,306,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		11	224,539,500	0	0	0	0	11	224,539,500
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA		4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM		3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		1	38,100,000	0	0	0	0	1	38,100,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		734	10,959,383,347	29	619,685,000	0	0	763	11,579,068,347

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTERAN

Tanggal : 09/08/2022

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 - BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		368	2,082,562,756	43	240,250,000	0	0	411	2,322,812,756
3.13.01	SUMUR		8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		1	199,292,000	0	0	0	0	1	199,292,000
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		3	53,868,000	0	0	0	0	3	53,868,000
133111	Gedung dan Bangunan		49	292,291,425,798	2	30,117,966,823	0	41,483,295,551	51	280,926,097,070
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		30	233,915,682,402	2	30,117,966,823	0	41,483,295,551	32	222,550,353,674
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		16	52,863,528,498	0	0	0	0	16	52,863,528,498
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		3	5,512,214,898	0	0	0	0	3	5,512,214,898
134111	Jalan dan Jembatan		15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
5.01.01	JALAN		15,687	7,384,906,693	0	2,964,032,161	0	0	15,687	10,348,938,854
134112	Irigasi		1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG		1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan		5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
5.03.10	INSTALASI LAIN		3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135121	Aset Tetap Lainnya		5,576	1,351,026,622	0	0	0	0	5,576	1,351,026,622
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		5,573	1,279,326,622	0	0	0	0	5,573	1,279,326,622
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		1	18,480,000	0	0	0	0	1	18,480,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTERAN

Tanggal : 09/08/2022

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 - BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		808	5,693,074,104	0	0	0	0	808	5,693,074,104
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		10	589,786,000	0	0	0	0	10	589,786,000
3.05.01	ALAT KANTOR		199	1,966,627,282	0	0	0	0	199	1,966,627,282
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		462	296,155,800	0	0	0	0	462	296,155,800
3.06.01	ALAT STUDIO		9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		3	12,642,500	0	0	0	0	3	12,642,500
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		2	162,000	0	0	0	0	2	162,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		92	861,026,774	0	0	0	0	92	861,026,774
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		19	10,503,882	0	0	0	0	19	10,503,882
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		9	1,394,712,000	0	0	0	0	9	1,394,712,000
T O T A L				1,056,818,798,622		45,296,521,551		42,169,041,551		1,059,946,278,622

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTERAN

Tanggal : 09/08/2022

Kode Lap : LBSESSKT

NAMA UAKPB : 013.12.0199.108266 - BADAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 01-JANUARI-2022		MUTASI				SALDO PER 30-JUNI-2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		2,869	897,414,858	4	1,924,000	0	0	2,873	899,338,858
3.05.01	ALAT KANTOR		759	138,479,600	4	1,924,000	0	0	763	140,403,600
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1,923	673,384,380	0	0	0	0	1,923	673,384,380
3.06.01	ALAT STUDIO		39	31,024,998	0	0	0	0	39	31,024,998
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		30	11,962,500	0	0	0	0	30	11,962,500
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		4	470,000	0	0	0	0	4	470,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		34	26,173,380	0	0	0	0	34	26,173,380
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		80	15,920,000	0	0	0	0	80	15,920,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	225,000	0	0	0	0	1	225,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		1	225,000	0	0	0	0	1	225,000
T O T A L				897,639,858		1,924,000		0		899,563,858